



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RUU  
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

**TANGGAL 14 MARET 2019**

---

Tahun Sidang : 2018- 2017  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke : 3 (tiga)  
Jenis rapat : Rapat Baleg  
Hari/tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
P u k u l : 13.57 WIB s/d 15.20 WIB.  
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1  
A c a r a : Penyampaian Laporan Tim Ahli atas pelaksanaan  
Diplomasi Parlemen Badan Legislasi ke Chili dan  
Argentina dalam rangka Penyusunan RUU tentang  
Penanggulangan Bencana.  
Ketua Rapat : Drs. Sudiro Asno.,AK  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : 15 orang, ijin 6 orang dari 74 orang Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan laporan Tim Ahli atas Pelaksanaan Diplomasi Parlemen Badan Legislasi ke Chili dan Argentina terkait dengan Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Drs. Sudiro Asno, AK.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.57 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Diplomasi Parlemen tersebut.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Tim Ahli atas pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke Chili dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana diperlukan pendalaman untuk menemukan solusi yang tepat dan akurat demi memperbaiki sistem penanggulangan bencana. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke negara yang memiliki karakteristik kebencanaan yang serupa dengan Indonesia dan memiliki sistem penanggulangan bencana yang terpadu.
2. Lembaga atau instansi yang dikunjungi pada pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke Chili dan hasilnya sebagai berikut :

**a) Kedutaan Besar Indonesia di Chili**

Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh Duta Besar RI Philemon Arobaya dan sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena Chili merupakan negara yang memiliki karakteristik wilayah yang hampir mirip dengan Indonesia dan merupakan negara yang cukup sering dilanda bencana, namun Chili sudah memiliki sistem penanggulangan bencana yang cukup baik.

Duta Besar juga menginformasikan bahwa Tim mitigasi bencana di Chili juga sudah berjalan dengan baik, ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Chili sering sekali terjadi gempa, dan bangunan di Chili sudah dirancang untuk tahan terhadap gempa yang berkekuatan hingga 10SR, hal ini menyebabkan apabila terjadi gempa, masyarakat tidak akan berhamburan keluar dan akan tetap beraktivitas seperti biasa karena yakin akan keamanan Gedung tempat mereka berada.

**b) La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI)**

ONEMI merupakan suatu badan seperti BNPB di Indonesia dan strukturnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Chili.

ONEMI melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Lembaga dan organisasi teknis lainnya, memberikan peringatan awal (Early Warning) dan sistemnya, melakukan koordinasi antara lain NCPP, serta menciptakan ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap bencana.

NCPP memvalidasi penggunaan konvensi sinyal internasional, yaitu digunakannya 3 (tiga) warna sinyal lalu lintas (merah, kuning, dan hijau). Sistem siap siaga nasional hanya diaktifkan apabila ada potensi bencana atau bencana telah terkonfirmasi.

Salah satu fungsi terpenting ONEMI adalah mengembangkan Early Warning System (EWS) atau Sistema de Alerta Emergencias yang memberi peringatan pada saat ada keadaan bahaya atau bencana dengan bekerjasama dengan CIGIDEN.

ONEMI kadang mengambil tindakan preventif, misalnya pada daerah yang memiliki kemungkinan tinggi untuk terjadinya tanah longsor, pada saat curah hujan diperkirakan atau sudah tinggi maka ONEMI memberikan peringatan bagi warga penduduk di daerah tersebut untuk mengungsi sebelum bencana tanah longsor tersebut terjadi.

c) **Centro de Investigacion para la Gestion Integrada del Riesgo de Desastres Naturales/CIGIDEN (National Research Center for Integrated Disaster Risk Management)**

Cigiden merupakan Lembaga non-profit yang sebagian operasionalnya dibiayai oleh pemerintah. Cigiden melakukan penelitian mengenai strategi mitigasi yang efisien.

d) **Junta Nacional de Bomberos de Chile/BOMBEROS**

Bomberos di Chili didirikan pertama kali pada tahun 1851 di Valparaiso dan saat ini di Chili ada 313 markas Bomberos dan tiap departemen memiliki markasnya masing-masing, serta terdapat 51.120 sukarelawan, 5.535 orang diantaranya adalah perempuan. Bomberos sendiri memiliki kurang lebih 3.000 armada kendaraan.

Untuk sukarelawan, Bahasa bukan merupakan faktor utama, yang utama adalah standar pelatihan yang digunakan. Oleh karena itu Chili menggunakan standar akreditasi pelatihan Amerika Serikat yang diakui internasional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan UN-INSARAG dan ada hak istimewa yang diberikan khusus untuk sukarelawan Bomberos apabila sedang menjadi sukarelawan maka ia tidak dapat dipecah dari pekerjaannya dengan alasan tidak masuk dan menjadi sukarelawan Bomberos.

e) **Bomberos de Santiago**

Misi yang diemban Bomberos merupakan misi kemanusiaan yang tidak boleh disusupi oleh isu seperti politik dan isu-isu strategis lainnya, 98% masyarakat Chili menganggap keberadaan Bomberos sangatlah penting, hal ini menjadi motivasi bagi Bomberos untuk lebih baik lagi.

Terkait pendanaan, 30% dari Pemerintah, 15-20% dari uang hasil sewa asset yang dimiliki Bomberos Santiago, 45-50% dari masyarakat sebagai donasi yang diaudit untuk kemudian dilaporkan kembali kepada masyarakat dan dana yang berasal dari masyarakat digunakan sepenuhnya untuk kendaraan,

operasional, dan perlengkapan Bomberos, bukan untuk hal lainnya.

B. Laporan Tim Ahli atas pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke Argentina dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

1. Argentina menerapkan kesiapsiagaan yang dapat secara efektif menyelamatkan dan melindungi kehidupan dan mata pencaharian sehingga berkontribusi pada kelanjutan pembangunan masyarakat dalam jangka panjang. Argentina menganggap investasi pada upaya preventif dalam kesiapsiagaan bencana jauh lebih menguntungkan dibanding mengatasi kerusakannya di kemudian hari.
2. Lembaga atau instansi yang dikunjungi pada pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke Argentina dan hasilnya sebagai berikut :

a) **Senado dan Diputados (Senat dan Parlemen)**

Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh *Senator Julio Cobos, Norma Durango, Omar Perotti, Pedro Brillard Pocard dan Deputes Astrid Hummel serta Alvaro González* di ruang Evita Peron parlemen Argentina.

Senado menginformasikan bahwa bencana alam utama di Argentina adalah banjir tahunan yang sangat mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat di Argentina dimana pendapatan utamanya adalah di bidang pertanian dan peternakan, oleh karenanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Terpadu Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Alam dan Perlindungan Sipil menjadi payung hukum bagi Dewan Nasional dalam mengkoordinasikan penanganan bencana alam secara terpadu mulai dari tingkat Pemerintah Provinsi hingga ke Ibu Kota.

Argentina melibatkan hampir semua kementerian dan lembaga untuk menangani bencana serta mengurangi dampaknya pada masyarakat, termasuk dalam hal ini asuransi, fasilitas kredit, keringanan pajak, beasiswa untuk anak sekolah selain pemulihan kondisi pasca bencana.

b) **Kedutaan Besar Republik Indonesia di Argentina**

Duta Besar sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena Argentina meskipun bukan negara dengan terpaan bencana sebanyak dan sebesar Indonesia, namun mereka menangani bencana dengan sangat baik.

Dalam pertemuan ini Duta Besar berkesempatan menyampaikan beberapa hal terkait politik di Argentina dan regulasi bencana berdasarkan bahan yang diberikan oleh parlemen Argentina.

c) **Protección Civil dan White Helmets**

SINAGIR merupakan instansi tertinggi dalam pengambilan keputusan, artikulasi dan koordinasi sumber daya negara nasional dan dilakukan secara terintegrasi oleh dewan nasional dan dewan federal. Tujuannya adalah untuk merancang, mengusulkan, dan menerapkan kebijakan publik untuk manajemen risiko yang komprehensif.

SINAGIR membuat rancangan tindakan penanggulangan bencana di tingkat kota, provinsi dan pemerintah federal untuk setiap situasi darurat berikut mekanisme kontrolnya. Rancangan tindakan tersebut meliputi persiapan, pelaksanaan rencana, dan rehabilitasi. Pengajuan anggaran tergantung pada rancangan tindakan ini.

d) **White Helmets**

The White Helmets Commission merupakan badan di Kementerian Luar Negeri Argentina yang bertugas merancang dan memberikan bantuan kemanusiaan atas nama Argentina dan juga mempromosikan praktek terbaik di bidang sukarelawan dan bekerja untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* berkaitan dengan promosi dan penguatan berkurangnya risiko bencana di level global, regional, nasional dan lokal.

White Helmets bekerja dengan melibatkan sukarelawan dan NGO yang konsern dengan bantuan kemanusiaan dan diakui oleh PBB sebagai bagian dari partisipasi sukarela Argentina dalam kegiatan PBB di bidang pemulihan humanitarian, rehabilitasi dan kerjasama teknis untuk pembangunan.

C. Tanggapan Anggota Badan Legislasi atas laporan kunjungan kerja pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke Chili dan Argentina terkait dengan Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut :

1. Mengusulkan agar penyusunan draft RUU tentang Penanggulangan Bencana dapat mencontoh Argentina dalam melakukan penanganan bencana banjir.
2. Kiranya RUU tentang Penanggulangan Bencana dapat juga mengambil prinsip Argentina yaitu untuk melakukan pencegahan dibanding dengan melakukan perbaikan setelah terjadi bencana, hal ini sejalan dengan pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati.
3. Mengusulkan agar judul RUU dapat diubah menjadi RUU tentang Pencegahan dan Penanggulan Bencana.
4. Diharapkan *early warning System* di Indonesia dapat diaktifkan sehingga tidak ada lagi kejadian seperti halnya bencana tsunami Selat Sunda.

5. Diharapkan dengan adanya perkembangan teknologi saat ini dapat mencegah terjadinya bencana alam yang dapat diprediksi.
6. Meminta Tim Ahli, untuk dapat mengkaji Undang-Undang tentang Kehutanan yang diduga memberikan peluang terjadinya kerusakan alam yang menimbulkan bencana alam.
7. Meminta kepada Tim Ahli untuk dapat menginventarisasi jenis-jenis bencana dan bagaimana pencegahannya, agar memudahkan dalam melakukan penyempurnaan draft RUU tentang Penanggulangan Bencana ini.
8. Mengingatkan kepada Tim Ahli, jika usulan perubahan judul menjadi RUU tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, maka substansi untuk ancaman pidana harus masuk di dalam pasal-pasal.
9. Perlu adanya sinkronisasi dan inventarisasi dengan undang-undang terkait yang ada.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Laporan hasil pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke Chili dan Argentina yang telah disampaikan oleh Tim Ahli dan seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan juga oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam kegiatan penyusunan dan penyempurnaan draft RUU tentang Penanggulangan Bencana.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 14 Maret 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

  
WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001